

## **“APBD YANG DIPERCAYA,” REBRANDING KEUANGAN DAERAH YANG KREDIBEL—PENGALAMAN NEGARA-NEGARA EROPA**

Rostamaji Kornawan  
Kementerian Keuangan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  
Email: Rostamaji\_k@yahoo.com

### **Abstrak**

APBD sebagai produk keuangan daerah memerlukan pendekatan baru untuk dapat dipahami dan dapat diterima publik di daerah tersebut. Untuk dapat diterima oleh publik, kajian ini bertujuan untuk membangun konsep produk keuangan daerah yang dapat diterima publik. Konsep yang dibangun dalam produk keuangan daerah tersebut adalah dengan membangun *rebranding* APBD agar dapat menarik kepercayaan masyarakat. *Rebranding* tersebut dibangun dengan cara mengkomunikasikan “APBD Yang Dipercaya” di dalam kehidupan masyarakat daerah. Dengan mengkomunikasikan *branding* produk keuangan daerah yang efektif, pemikiran masyarakat setempat diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat daerah itu sendiri. Dalam menganalisa *rebranding* APBD yang ditawarkan kepada pemerintah daerah, kajian ini menggunakan pendekatan *literature review* yang dicari secara sistematis. Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengembangkan *rebranding* tersebut, khususnya untuk meningkatkan kinerja APBD melalui keunggulan yang dimiliki daerah tersebut.

**Kata-kata Kunci:** APBD, *Rebranding* keuangan daerah, Kepercayaan, Negara-negara Eropa

### **Abstract**

Regional Government Budget as regional financial product needs a new approach to be understandable and acceptable by the public in such region. To make it accepted by the public, this review aimed to build a concept of acceptable regional financial product. The concept was built by rebranding the Regional Government Budget in order to attract the public's trust. Such rebranding was done by communicating “the trusted Regional Government Budget” amid regional people. By communicating the branding of effective regional financial product, it was expected that local public's thought could change their own behaviors. In analyzing the rebranding of the Regional Government Budget offered to the Regional Government, this review was using literature review approach which was done systematically. The Regional Government has capacity to develop the rebranding process, especially to improve the performance of the Regional Government Budget through the excellences of the region.

**Keywords:** APBD, Rebranding municipal finance, Trust, European countries.

## **PENDAHULUAN**

Keuangan negara merupakan keuangan yang dikelola pemerintah secara transparan dan bertanggung jawab (European Commission, 2008: p.127). Masyarakat membutuhkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara

yang dilakukan pemerintahnya akan dapat dilihat dari ukuran ataupun indikator penilaian kepuasan masyarakat, seperti indeks kepuasan masyarakat terhadap tindakan pemerintahannya dalam mengatasi perilaku korupsi. Penilaian penyampaian laporan keuangan negara yang dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan yang berlaku juga merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara yang ada di Indonesia secara tepat juga menjadi indikator kepuasan masyarakat daerah terhadap pemerintah daerahnya. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, kepercayaan masyarakat daerah dalam menilai kinerja pemerintah daerahnya tentu juga akan meningkat.

“Kepercayaan” menjadi *trend* topik yang sering dibicarakan publik setelah pemerintahan Joko Widodo memasuki sistem pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak bulan Oktober 2014 lalu. Bahkan di dalam komunikasi pemerintahan pusat, “APBN Yang Terpercaya” menjadi *branding* di dalam strategi komunikasi pemerintahan untuk memberikan identitas keuangan negara yang kredibel. Kredibilitas keuangan negara yang disampaikan pemerintah di masa pemerintahan Joko Widodo pada dasarnya telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun dalam setiap pemerintahan, *repositioning* sudah menjadi tradisi untuk melihat apa yang masih kurang atau apa yang masih perlu untuk dilakukan di dalam pemerintahan yang sedang berjalan.

Untuk membentuk identitas baru dan menarik sumber daya yang bertalenta yang sesuai dengan gagasan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, pemerintah memerlukan sebuah *branding* baru untuk melekatkan gagasan, tujuan, maupun sasaran pemerintah tersebut kepada publik (Silvanto and Ryan, 2014). Komunikasi yang efektif terhadap gagasan, tujuan, dan sasaran pemerintah akan mendorong publik untuk mengikuti gerak pemerintah dalam mencapai, tujuan dan sasaran itu. Agar tujuan dan sasaran dapat terpenuhi, pemerintah membentuk konsep yang baru dalam melihat konteks situasi yang berlaku pada saat itu. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk konsep *governance* dilingkungan pemerintahan dengan *me-rebranding* produk yang dihasilkan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana publik menangkap gagasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. APBN dan APBD menjadi salah satu produk pemerintah dari sistem keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Dalam perkembangan sistem keuangan negara yang ada di Indonesia, APBD dianalogikan sebagai *spoke* dan APBN dianalogikan sebagai *hub*. Kedua produk keuangan negara tersebut harus memberikan pertanggungjawaban yang selaras dihadapan masyarakat karena uang yang dikelola di dalam APBN dan APBD tersebut merupakan uang yang dikumpulkan dari pendapatan masyarakat. Masyarakat akan melihat dan merasakan manfaat dari uang yang mereka kumpulkan tersebut. Dalam sistem keuangan negara,

pemerintah akan berperan sebagai aparatur negara sekaligus sebagai pelayan masyarakat yang akan mempertanggungjawabkan keuangan negara secara transparan dari uang publik yang mereka kelola.

Di beberapa negara, terutama negara-negara anggota Uni Eropa, kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi perhatian sebagian besar masyarakat di negara-negara anggota Uni Eropa tersebut. Dari Survei yang diselenggarakan Price Waterhouse Cooper (2014) terhadap 10 negara anggota Uni Eropa (Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, Polandia, Belgia, Swedia, Belanda, Inggris, dan Finlandia), hampir sebagian besar masyarakat di 10 negara anggota Uni Eropa tersebut memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah mereka telah memberikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang memadai. Namun pada kesempatan yang sama di dalam survei tersebut juga, sebagian kecil masyarakat di 10 negara anggota Uni Eropa menilai bahwa mereka tidak mendapatkan informasi keuangan publik dengan baik. Dengan kata lain, publik di ke-10 negara anggota Uni Eropa menilai bahwa transparansi pertanggungjawaban keuangan negara dinilai kurang. Hanya negara Finlandia yang memiliki nilai survei paling tinggi dibandingkan 9 negara anggota Uni Eropa lainnya dalam hal transparan keuangan publik.

Kurangnya transparansi keuangan negara di negara-negara anggota Uni Eropa memperlihatkan suatu realitas bahwa transparansi keuangan publik masih menjadi masalah (Torres, 2005) meskipun kondisi tersebut terjadi di negara maju, seperti negara Perancis dan Jerman. Kasus penghindaran pajak (*tax evasion*) menjadi satu kasus yang memperlihatkan kepada publik bahwa penghindaran pajak dapat terjadi di negara maju seperti negara-negara Uni Eropa. Penghindaran pajak dilakukan karena adanya faktor stimulan yang dipengaruhi dari penawaran tingkat pajak yang rendah yang ditawarkan dari negara lain. *Tax evasion* cenderung negatif di mata publik mengingat penerimaan pajak dapat berkurang. Tidak hanya dapat mengurangi pajak, *tax evasion* bahkan dapat menyebabkan adanya pelarian uang dari hasil tindak kejahatan seperti korupsi (Stack, 2015) atau uang hasil kejahatan yang digunakan untuk membiayai sejumlah rangkaian kejahatan terorisme. Tindakan penyalahgunaan pengelolaan keuangan tersebut cenderung lebih dikenal sebagai tindak kejahatan *money laundering* (Subashi, 2013; Storm, 2013; Stack, 2015).

Untuk menghindari dan mengurangi perilaku negatif dari pengelolaan keuangan negara, pemerintah Indonesia berupaya menyakinkan publik bahwa uang negara yang dikelola pemerintah saat ini dapat dipercaya. Daerah perlu mengambil peran aktif dalam mengelola keuangan daerahnya agar APBD yang mereka kelola juga mendapatkan apresiasi dari pandangan masyarakat di daerah. Kapasitas daerah dalam mengelola keuangan daerah di setiap daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengukur kapasitas yang mereka miliki untuk menentukan keunggulannya sendiri dalam menghasilkan pertanggungjawaban APBD yang dapat dipercaya. Jika *rebranding* APBN

adalah menciptakan APBN yang dapat dipercaya, maka APBD pun juga harus dapat melakukan *rebranding* dengan menghadirkan APBD yang juga dapat dipercaya.

Dari semua penjelasan di atas, kapasitas daerah dalam mengelola keuangan daerah yang kredibel menjadi topik utama yang akan dijelaskan di dalam kajian ini. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk membangun konsep APBD sebagai produk keuangan daerah yang dipercaya melalui penjelasan manfaat dari *rebranding* “APBD Yang Dipercaya.” Penjelasan manfaat dari *rebranding* “APBD Yang Dipercaya” akan dijelaskan dengan melihat pengalaman persepsi publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang ada di negara-negara Eropa. *Rebranding* terhadap APBD sebagai produk keuangan daerah akan mendorong publik untuk mengetahui lebih jelas keuangan daerahnya sebagai bagian dari bentuk investasi publik yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. Melalui konsep *rebranding* terhadap APBD tersebut, kajian ini ingin mempertanyakan sebuah pertanyaan yang ingin dicapai. Bagaimanakah meningkatkan kepercayaan publik melalui *rebranding* APBD? Pertanyaan yang digunakan untuk mencapai tujuan kajian ini akan dijawab dengan membandingkan kepercayaan publik negara-negara Eropa yang diberikan kepada pemerintahnya terhadap pengelolaan keuangan negara melalui studi literatur yang didukung beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam mencari sumber literatur yang dinilai dapat merepresentasi kajian ini untuk dasar analisa, pencarian literatur membatasi pencarian dengan menggunakan beberapa kata kunci. Kata kunci pertama adalah “public finance.” Sedangkan kata kunci kedua adalah “branding.” Namun pencarian kata kunci “branding” akan terlihat sangat luas. Untuk membatasi pencarian literatur ke sumber yang lebih spesifik, maka pencarian ditambahkan dengan menggunakan kata kunci “branding public finance.”

Sementara itu, pencarian sumber literatur dengan kata kunci “*tax evasion*” digunakan untuk menjelaskan permasalahan pengelolaan keuangan publik yang terjadi di negara-negara Eropa. *Tax evasion* atau penghindaran pajak merupakan salah satu dari beberapa jenis permasalahan yang dihadapi suatu negara di dalam pengelolaan keuangan publiknya. Seluruh pencarian sumber literatur dengan menggunakan semua kata kunci tersebut akan disortir untuk menentukan sumber literatur yang sesuai yang digunakan untuk menganalisa kajian ini. Dalam menganalisa sumber literatur yang telah ditentukan tersebut, kajian ini juga menggunakan data skunder sebagai data pendukung dalam menyimpulkan hasil analisa yang akan dibuat pada pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan. Data skunder diperoleh dari sumber yang ada di artikel ataupun yang ada di beberapa alamat situs di dalam jaringan *cyberspace*.

## HASIL PENELITIAN

### **Indikator Persepsi Kepercayaan Publik Di Negara-Negara Eropa Terhadap Pengelolaan Keuangan Publik**

Indikator kepercayaan publik terhadap keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan di negara-negara Eropa ditanggapi secara beragam oleh masyarakatnya. Di dalam negara-negara anggota Uni Eropa, masyarakat yang ada di negara-negara tersebut juga memiliki persepsi yang berbeda terhadap kinerja keuangan publik yang dikelola oleh pemerintahan mereka masing-masing. Persepsi masyarakat yang berbeda di negara-negara anggota Uni Eropa terjadi karena adanya perbedaan situasi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di negara-negara anggota Uni Eropa.

Sementara itu dari sisi pemerintahan yang ada di negara-negara anggota Uni Eropa sendiri, pertanggungjawaban keuangan negara telah disampaikan kepada publik dengan baik. Pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa mempublikasikan kegiatan pengelolaan keuangan negara mereka melalui fasilitas teknologi informasi, seperti jaringan internet. Secara spesifik, *e-budgeting* menjadi wujud konkrit dari implementasi pengelolaan keuangan negara yang transparan. Jika dilihat dari hasil survei yang disampaikan oleh Price Waterhouse Cooper (2014) terhadap 10 negara anggota Uni Eropa, sebagian besar publik menilai bahwa mereka belum mendapatkan informasi keuangan negara secara tepat. Atau dengan kata lain, persepsi publik yang menilai bahwa mereka mendapatkan informasi keuangan publik secara transparan hanya sekitar 22% untuk responden dengan jenis kelamin pria dan 16% untuk responden dengan jenis kelamin wanita.

Masih minimnya kepercayaan publik di negara anggota Uni Eropa terhadap keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan mereka dapat dilihat pada kasus krisis keuangan yang pernah terjadi di Eropa pada tahun 2008 yang lalu. Sebagian negara anggota Uni Eropa, seperti Yunani, Irlandia, Siprus, Portugal, dan Spanyol menjadi negara yang mengalami krisis keuangan yang paling parah. Krisis keuangan terjadi karena ketidakdisiplinan pemerintah negara-negara Eropa dalam mengelola anggaran negara mereka. Defisit anggaran negara yang seharusnya dijaga pada kisaran 3% ternyata telah melampaui angka tersebut. Dalam Traktat Maastricht, konvergensi keuangan negara terhadap angka defisit anggaran negara di negara-negara anggota Uni Eropa dibatasi pada angka defisit anggaran negara sebesar 3%. Namun angka tersebut tidak dapat dipenuhi oleh sebagian negara anggota Uni Eropa akibat pengelolaan utang negara dan pengeluaran negara yang tidak dapat dikendalikan. Ketidakdisiplinan sebagian negara anggota Uni Eropa dalam mengelola anggaran negara menjadi faktor pemicu terjadinya krisis keuangan pada saat itu (Stark, 2013).

Akibat krisis keuangan yang terjadi di beberapa negara anggota Uni Eropa menyebabkan krisis kepercayaan di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat di negara anggota Uni Eropa yang mengalami krisis keuangan berupaya

mendorong pemerintahannya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Upaya penolakan bantuan keuangan dari International Monetary Fund (IMF) dan European Central Bank (ECB) dari masyarakat Yunani juga menjadi salah satu cerminan ketidakpercayaan masyarakat negara anggota Uni Eropa terhadap pemerintahannya dalam mengelola keuangan negara (Moutos and Tsitsikas, 2010). Unjuk rasa yang disampaikan masyarakat Spanyol atas kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran pada tahun 2012 menjadi salah satu refleksi dari ketidakpercayaan yang disampaikan masyarakat negara anggota Uni Eropa kepada pemerintahannya. Dalam kondisi krisis ekonomi yang harus diselesaikan dengan sebuah kebijakan pemerintah yang tidak populer, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang wajar. Kepercayaan masyarakat tersebut merupakan ungkapan kekecewaan yang wajar yang diaspirasikan oleh masyarakatnya sendiri.

Pemulihan kepercayaan masyarakat di negara anggota Uni Eropa akibat krisis keuangan belum sepenuhnya pulih. Masyarakat bahkan harus dihadapkan pada persoalan sosial akibat kedatangan kaum imigran yang datang ke negara-negara Eropa secara masif. Para imigran yang datang ke daratan Eropa tersebut berasal dari negara-negara yang mengalami konflik dan mengalami masalah ekonomi. Situasi sosial ini tentu menambah krisis kepercayaan masyarakat Eropa terhadap pemerintahannya dalam mengatasi *double crisis* yang terjadi, yaitu krisis keuangan dan krisis sosial.

Khusus untuk mengatasi krisis keuangan akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak disiplin, Komisi Uni Eropa mendukung implementasi pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada hasil. Anggaran berbasis hasil tersebut diwujudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi serta stabilitas sosial (European Commission, 2016). Untuk mewujudkan hal tersebut, Uni Eropa bersama-sama dengan negara anggota Uni Eropa tetap harus terus memantau kondisi keuangan negara mereka mengingat gejolak sosial sampai dengan pertengahan tahun 2016 masih tetap terjadi di beberapa negara anggota Uni Eropa.

Anggaran berbasis hasil (Budget Focused on Results [BFOR]) yang diusulkan Komisi Uni Eropa tersebut menjadi *branding* keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan anggota Uni Eropa. *Branding* tersebut akan sangat membantu memulihkan kepercayaan publik, terutama sejak krisis kepercayaan muncul di dalam masyarakat akibat krisis keuangan dan krisis sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Pemerintah dan masyarakat negara anggota Uni Eropa berusaha secara sinergi menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar kondisi ekonomi dapat kembali stabil. Irlandia yang menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang berhasil keluar dari krisis dan mengangkat pertumbuhan ekonominya kembali. Namun krisis kepercayaan kembali menerpa negara

tersebut akibat kasus *tax evasion* yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

*Tax evasion* yang terjadi di Irlandia diakibatkan karena adanya perlakuan khusus yang diberikan pemerintah Irlandia kepada salah satu perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut. Publik pun kembali bertanya terhadap kebijakan pemerintahannya di dalam mengelola keuangan negara yang dapat dipercaya. Namun demikian, publik masih tetap melihat bahwa pemerintahannya mampu mengatasi masalah tata kelola keuangan negara secara profesional dan kompeten. Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan indeks *Financial Secrecy* dan indeks *Corruption Perceptions* untuk negara-negara anggota Uni Eropa.

Tabel 1 yang menyajikan indeks *Financial Secrecy* membuktikan bahwa indeks kerahasiaan institusi keuangan dalam memberikan informasi keuangannya kepada publik berada di tingkat rata-rata. Dari 28 negara anggota Uni Eropa, Denmark dan Finlandia memiliki indeks kerahasiaan keuangan yang lebih kecil. Nilai indeks yang kecil tersebut menjelaskan bahwa kerahasiaan institusi keuangan dalam memberikannya kepada publik tidak terlalu ketat. Dengan kata lain, publik dapat mengakses informasi keuangan secara bebas, meskipun ada beberapa informasi yang tidak dapat diinformasikan secara luas kepada publik. Sementara itu, Austria, Jerman, dan Luxemburg memiliki indeks kerahasiaan di atas 50. Indeks tersebut menjelaskan bahwa tingkat kerahasiaan institusi keuangan dalam memberikan informasi keuangan kepada publik sangat terbatas.

Sedangkan pada Tabel 2, tabel ini menyajikan indeks peringkat korupsi di negara-negara anggota Uni Eropa. Pada tabel tersebut, sebagian besar negara-negara anggota Uni Eropa memiliki tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah korupsi. Hampir sebagian besar negara anggota Uni Eropa memiliki peringkat pencegahan korupsi yang sangat baik. Denmark, Finlandia, Belanda, dan Swedia merupakan negara yang diberikan persepsi sangat baik oleh publik. Khusus untuk Denmark dan Finlandia, Indeks *Corruption Perceptions* negara tersebut sejalan dengan indeks *Financial Secrecy* mereka.

Indeks *Financial Secrecy* dan indeks *Corruption Perceptions* menjadi indikator bagi publik bahwa pengelolaan keuangan negara di negara-negara anggota Uni Eropa sudah cukup memadai. Namun tidak semua negara anggota Uni Eropa memiliki capaian kinerja keuangan negara yang dinilai publik sangat memuaskan. Bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang terletak di wilayah Eropa bagian Barat, publik menilai sangat baik terhadap hal yang menyangkut kepercayaan publik atas tingkat korupsi. Indeks kepercayaan ini berbanding terbalik dengan tingkat kerahasiaan informasi keuangan di mana negara-negara anggota Uni Eropa yang terletak di wilayah bagian Barat benua Eropa memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Kepercayaan publik terhadap tingkat korupsi dan minimnya transparansi

informasi keuangan publik menjadi informasi publik yang asimetris. Namun demikian, masyarakat secara umum masih memberikan penilaian yang baik terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya di negara-negara anggota Uni Eropa yang terletak di wilayah Eropa bagian Barat.

Untuk negara-negara anggota Uni Eropa yang terletak di wilayah bagian Utara, penilaian publik terhadap pemerintahannya jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang terletak di wilayah Eropa bagian Barat. Kedua indeks di bawah, yaitu indeks kepercayaan publik terhadap tingkat korupsi dan indeks transparansi keuangan publik, menunjukkan penilaian yang sejalan di mana publik memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan, khususnya keuangan negara. Sementara itu, negara-negara anggota Uni Eropa yang terletak di wilayah Eropa bagian Selatan dan Timur, khususnya Bulgaria, Yunani, Italia, Rumania, Slovakia, Kroasia, dan Hungaria, menjadi negara-negara anggota Uni Eropa yang tingkat kepercayaan publiknya masih sangat rendah. Indeks peringkat korupsi ketujuh negara tersebut berada jauh di bawah dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Dari penjelasan beberapa indikator di atas yang digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat kepercayaan publik di negara-negara Eropa dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dinilai sudah cukup baik. Tidak semua negara di Eropa memiliki tingkat kepercayaan publik yang sama terhadap kepercayaan akan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan terbebas dari stigma korupsi. *Branding* "Budget Focused on Results" yang disampaikan Komisi Uni Eropa untuk menyajikan keuangan negara yang kredibel bagi masyarakat di negara-negara anggota Uni Eropa menjadi pondasi dalam membangun kepercayaan publik. Indeks tersebut membuktikan bahwa koordinasi sistem keuangan dan kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik (Moro, 2014). Dari pelajaran membangun kepercayaan di negara-negara Eropa tersebut, kajian ini akan mencoba melihat apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik terhadap keuangan daerah melalui *branding* "APBD Yang Dipercaya."

### **Rebranding APBD Sebagai Strategi Pemerintah Menggali Potensi Keuangan Daerah**

Indikator kepercayaan publik dari pengelolaan keuangan negara di negara-negara Eropa yang telah dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menghasilkan produk kerja yang terbaik bagi daerahnya, khususnya dalam membangun potensi ekonomi daerah melalui pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat dipercaya.



**Tabel 1. Financial secrecy index 2015—European Union Countries**

Country	Secrecy Score	Country	Secrecy Score
Austria	54	Italy	35
Belgium	41	Latvia	45
Bulgaria	-	Lithuania	-
Croatia	-	Luxembourg	55
Cyprus	50	Malta	50
Czech Republic	35	Netherlands	48
Denmark	31	Poland	36
Estonia	44	Portugal	39
Finland	31	Romania	-
France	43	Slovakia	50
Germany	56	Slovenia	34
Greece	36	Spain	33
Hungary	36	Sweden	36
Ireland	40	United Kingdom	41

Sumber: *Financialsecrecyindex.com*



**Tabel 2. Corruption perceptions index 2015—European Union Countries**

Country	Rangking	Country	Rangking
Austria	16	Italy	61
Belgium	15	Latvia	40
Bulgaria	69	Lithuania	32
Croatia	50	Luxembourg	10
Cyprus	32	Malta	37
Czech Republic	37	Netherlands	5
Denmark	1	Poland	30
Estonia	23	Portugal	28
Finland	2	Romania	58
France	23	Slovakia	50
Germany	10	Slovenia	35
Greece	58	Spain	36
Hungary	50	Sweden	3
Ireland	18	United Kingdom	10

Sumber: *transparency.org*

Koordinasi pusat dan daerah dalam mengendalikan anggaran negara, baik itu anggaran pusat maupun anggaran daerah, merupakan koordinasi yang rutin yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, koordinasi akan menjadi semakin efektif apabila pemerintah daerah mampu mengikuti langkah pemerintah pusat untuk membentuk pola komunikasi yang intensif kepada masyarakat melalui program *rebranding* produk keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk *rebranding* produk keuangan pusat, pemerintah menghadirkan *branding* "APBN Yang Dipercaya." *Branding* tersebut digunakan untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap APBN yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat. Melihat hal itu, pemerintah daerah sepatutnya juga turut mengubah *branding* produk keuangan daerahnya untuk menarik kepercayaan masyarakat daerah itu sendiri.

Konsep *rebranding* yang digunakan di dalam mengelola APBN dapat digunakan pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan produk keuangan daerah, yaitu APBD-nya, menjadi keuangan daerah yang dapat dipercaya. Artinya, *rebranding* yang akan digunakan pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan tujuan, sasaran, dan strategi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah sama dengan *rebranding* APBN yang merupakan produk keuangan negara pemerintah pusat. "APBD Yang Dipercaya" menjadi promosi pemerintah daerah dalam mendekatkan program pemerintah daerah untuk dapat dikenali oleh masyarakat daerahnya secara dekat.

*Rebranding* APBD yang dipercaya masyarakat tidak diwujudkan semata-mata hanya untuk menghadirkan perubahan ataupun sekedar untuk memberikan suasana penyegaran terhadap kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Tetapi, *rebranding* APBD juga memiliki tujuan yang tujuan utamanya adalah untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan *value* atas kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Efektifitas untuk mencapai hasil dari program *rebranding* APBD, yaitu untuk menarik kepercayaan masyarakat, akan terlihat dari sikap dan kondisi masyarakat yang mereka perlihatkan.

*Rebranding* juga dapat digunakan untuk membangun struktur APBD yang ekspansif dan eksploratif. Membangun struktur APBD yang ekspansif dan eksploratif tentu harus mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dalam pengesahan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, APBD juga harus mengacu kepada Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh DPRD. APBD yang ekspansif akan mendorong sumber penerimaan secara intensif dan mengelola pengeluaran daerah secara *prudent*. Sementara untuk membangun struktur APBD yang eksploratif, hal ini memiliki makna bahwa pengelolaan APBD dapat dimanfaatkan pada hal-hal yang bersifat kebaruan dan juga memberikan dampak *mutual* bagi kehidupan ekonomi dan sosial.

Struktur APBD yang eksploratif akan sangat terbantu dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah. Apabila program *branding* APBD berhasil menyakinkan publik, hasil yang diperoleh mungkin saja dapat mendorong investasi masuk ke daerah tersebut. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas APBD secara agresif dapat menarik perhatian investor untuk lebih dalam memperluas investasinya di daerah yang memiliki struktur APBD yang menyakinkan. Investasi yang masuk ke daerah bukan hanya satu-satunya dampak ekonomi dari hasil program *rebranding* yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi dampak ekonomi lainnya yang dapat dirasakan adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja, peningkatan kreativitas usaha kecil menengah, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas *capital*. Dengan struktur APBD yang eksploratif dan didukung program *rebranding* produk keuangan daerah, sistem keuangan daerah akan dapat dipercaya publik sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *rebranding* keuangan daerah menjadi kegiatan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. APBD yang kredibel masih menjadi kendala di beberapa daerah. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan *rebranding* produk keuangan daerah agar tujuan dari pengelolaan APBD yang dapat dipercaya masyarakat dapat tercapai. *Branding* "APBD Yang Dipercaya" akan memperkuat *mindset* masyarakat terhadap APBD yang kredibel. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memerlukan beberapa langkah yang strategis agar APBD yang dipercaya masyarakat dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Agar *branding* "APBD Yang Dipercaya" dapat menjadi pola pikir dan kebiasaan yang tertanam di dalam masyarakat maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan 1) komunikasi yang intensif kepada masyarakat, 2) menggunakan komunikasi struktur APBD untuk melihat potensi penyehatan struktur APBD, 3) mendukung secara intensif program pemerintah secara luas dalam memberantas tindak korupsi, 4) menyebarluaskan program pemerintah dalam membangun ekonomi daerah seperti pengelolaan dana desa, dana transfer pemerintah pusat, keterbukaan informasi publik, ataupun program dana pinjaman untuk daerah, 5) mengenalkan sejak dini APBD kepada institusi pendidikan di daerah, 6) memanfaatkan layanan digital maupun layanan informasi lainnya dalam menyebarluaskan manfaat dari APBD, dan 7) mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong efektifitas kebijakan fiskal, seperti halnya program *tax amnesty*, program UMKM mandiri, dan program-program lainnya.

Namun demikian, usaha yang akan dilakukan pemerintah tersebut akan menemukan beberapa kendala, terutama kendala dalam 1) masalah sumber daya manusia yang kompeten, 2) biaya yang harus dikeluarkan, serta 3) kendala politik, sosial, dan budaya setempat. Bagi pemerintah daerah, kendala-kendala tersebut sudah tidak asing lagi. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk

meningkatkan kesejahteraan bersama-sama melalui pengelolaan anggaran yang strategis dan pemanfaatan sumber daya unggulan di daerah. Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut dinilai mampu untuk diselesaikan pemerintah daerah melalui keunggulan kolaborasi gagasan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menyimpulkan bahwa indikator tingkat korupsi dan transparansi sistem keuangan di negara-negara Eropa, khususnya negara-negara anggota Uni Eropa, sudah sangat baik. Walaupun demikian, sebagian dari negara-negara anggota Uni Eropa masih belum memiliki indikator tingkat korupsi dan transparansi sistem keuangan yang baik. Semua indikator tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa telah menciptakan nilai kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintahannya di dalam mengelola keuangan negara.

Indikator kepercayaan masyarakat di negara-negara anggota Uni Eropa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam mengelola keuangan daerahnya secara transparan dan bertanggung jawab. Namun, pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipercaya masyarakatnya juga harus di dukung strategi pemerintah daerahnya dalam mengkomunikasikan produk keuangan daerah secara efektif. *Rebranding* “APBD Yang Dipercaya” menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan pemerintah daerah agar kepercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah daerahnya dalam mengelola keuangan daerah dapat meningkat. Komunikasi yang efektif terhadap *rebranding* “APBD Yang Dipercaya” juga harus didukung keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan keuangan daerah, khususnya permasalahan korupsi dan transparansi sistem keuangan di daerah.

## **KETERBATASAN**

Kajian ini masih memiliki banyak keterbatasan. Indikator keuangan daerah yang dapat dipercaya tidak hanya diukur dari indeks korupsi dan indeks keterbukaan informasi keuangan. Pada penelitian selanjutnya, para peneliti diharapkan dapat mengkomodir beberapa indikator lainnya yang secara signifikan dapat menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah indikator tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keuangan daerah yang dapat dipercaya. Penelitian ini juga kurang memiliki informasi mengenai indikator kepercayaan keuangan daerah yang dapat digunakan, khususnya indikator penilaian terhadap keuangan daerah di Indonesia. Diharapkan, para peneliti berikutnya dapat mengkomodir indikator penilaian tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kontributor mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, yang memberikan kesempatan kepada kontributor untuk menyelesaikan kajian ini. Selain itu, kontributor juga mengucapkan terima kasih kepada Pascasarjana Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia yang juga telah banyak membantu kontributor dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

- European Commission. 2016. *EU Budget Focused on Results*.  
<[http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm)>
- European Commission. 2008. *European Union Public Finance 4<sup>th</sup> Edition*. Belgium: European Communities. p.127.  
<[http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public\\_fin/EU\\_pub\\_fin\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf)>
- Moro, B. 2014. Lessons from the European Economic and Financial Great Crisis: A Survey. *European Journal of Political Economy*, pp.34S9—S24.
- Moutos, T., & Tsitsikas, C. (2010). Whither Public Interest: The Case of Greece's Public Finances. *FinanzArchiv/Public Finance Analysis*, 66(2), pp.170—206
- Price Waterhouse Cooper. 2014. *Trust in Public Finances, A Survey of Citizens in 10 European Countries*.  
<<https://www.pwc.com/gx/en/eu-institutions-services/pdf/icaew-pwc-report.pdf>>
- Silvanto, S., & Ryan, J. 2014. Relocation branding: A strategic framework for attracting talent from abroad. *Journal of Global Mobility*, 2(1), pp.102—120.
- Stack, G. 2015. Money Laundering in Ukraine. *Journal of Money Laundering Control*, 18(3), pp.382—394.
- Stark, J. 2013. Lessons From the European Crisis. *CATO Journal*, 33(3), pp.541—562.
- Storm, A. 2013. Establishing the Link Between Money Laundering and Tax Evasion. *The International Business & Economics Research Journal (Online)*, 12(11), pp.1437—1450.
- Subashi, R. 2013. The connection between money laundering and tax evasion. *International Journal of Global Business*, 6(2), pp.80—89.
- Torres, L. 2005. Service Charters: Reshaping Trust in Government: The Case of Spain. *Public Administration Review*, 65(6), pp.687—699.